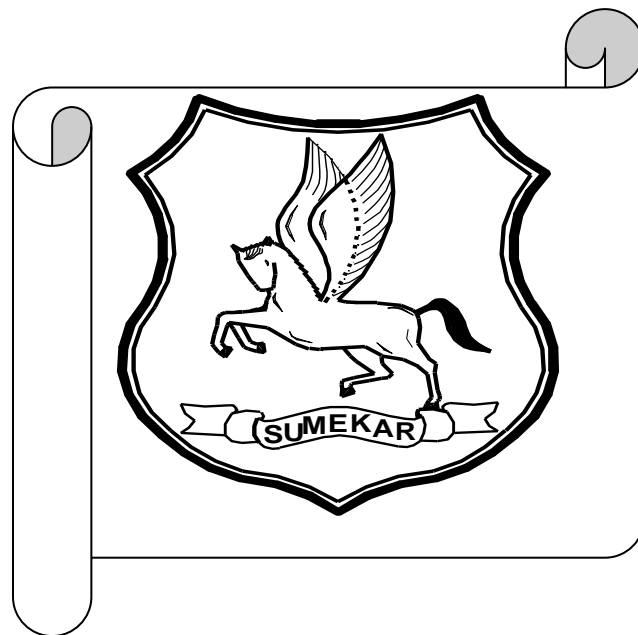


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2022 – 2026, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2025.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Sumenep, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	61
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	64
	2.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat	74
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	79
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	79
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	80
	3.3 Program dan Kegiatan	87
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	94
	4.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	95
	4.2 Prioritas Pembangunan	95
	4.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	96
BAB V	PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2023	10
Tabel 2.2	Belanja Langsung TA.2023	11
Tabel 2.3	Realisasi Program dan Kegiatan	16
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Sumenep	31
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep	47
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2025 Kabupaten Sumenep	66
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sumenep	74
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA	81
Tabel 3.2.2	Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	83
Tabel 3.2.3	Tujuan Perangkat Daerah	84
Tabel 3.2.4	Sasaran Perangkat Daerah	85
Tabel 3.2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	86
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sumenep	88
Tabel 4.1	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2023	95
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan daerah dengan Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	96
Tabel 4.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	97
Tabel 4.3.1	Sasaran dan Program Kegiatan	99
Tabel 4.3.2	Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	101
Tabel 4.3.3	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
26. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 23).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (Tahun 2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

- a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun 2023. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

terdiri dari 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 90,39% (per 31 Desember 2023).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja,

3. Program Hubungan Industrial

4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

terdiri dari 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023, sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja gaji dan tunjangan, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Belanja gaji dan tunjangan TA. 2023 sebesar **Rp. 7.331.537.009,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 6.516.675.065,- (88,89%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA. 2023

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi Keuangan SPJ	%
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	7.331.537.009	6.516.675.065	88,88
	BELANJA PEGAWAI	7.328.056.825	6.513.194.881	88,88
I	Gaji dan Tunjangan	4.348.474.834	4.082.902.922	93,89
1	Gaji Pokok PNS	3.362.473.669	3.228.072.163	96,00
2	Tunjangan Keluarga	322.701.652	302.463.072	93,72
3	Tunjangan Jabatan	104.826.750	70.080.000	66,85
4	Tunjangan Fungsional	254.118.000	211.600.000	83,27
4	Tunjangan Fungsional Umum	101.345.750	87.535.000	86,37
5	Tunjangan Beras	193.296.222	181.484.520	93,89
6	Tunjangan PPh	9.659.305	2.165.903	22,42
7	Pembulatan Gaji	53.486	42.264	79,01
II	Tambahan Penghasilan PNS	2.889.498.429	2.340.208.397	80,99
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.889.498.429	2.340.208.397	80,99
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	18.500.625	18.500.625	100,00

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi Keuangan SPJ	%
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	3.592.312	3.592.312	100
4	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60.875.000	60.875.000	100
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	7.115.625	7.115.625	100
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	633.936	633.936	100
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.846.248	2.846.248	100
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 2 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 (empat) Program dan 4 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 894.378.442,-** realisasi belanja **Rp. 758.270.745,- (84,78%)**
2. Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) Program dan 7 (tujuh) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.276.947.437,-** realisasi belanja **Rp. 2.136.011.463,- (93,81%)**.

Tabel 2.2
Belanja Daerah TA. 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	11.793.774.369	10.661.078.538	90,39
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.622.448.490	7.766.796.330	90,08
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.019.100	4.979.800	99,22
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.308.800	3.276.000	99,01
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	720.800	719.200	99,78
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	989.500	984.600	99,50
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89
I.3	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	44.055.900	43.456.000	98,64
I.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.055.900	43.456.000	98,64
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.360.200	157.810.806	94,86
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.550.100	14.545.800	99,97
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.092.650	10.092.500	100
I.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.112.900	20.048.000	99,68
I.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.838.200	10.769.000	99,36
I.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.752.000	20.977.504	75,59
I.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.657.000	80.024.002	98,00
I.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.357.350	1.354.000	99,75
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.274.619	39.108.333	99,58
I.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.274.619	39.108.333	99,58
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	816.153.265	797.037.783	97,66
I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.798.000	1.791.600	99,64

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.562.675	215.107.455	92,10
I.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.792.590	580.138.728	99,89
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.048.397	207.728.543	94,40
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.060.000	49.786.960	81,54
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.180.000	25.154.255	96,08
I.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.808.397	132.787.328	99,98
	URUSAN PENANAMAN MODAL	894.378.442	758.270.745	84,78
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	111.030.800	108.671.246	97,87
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	111.030.800	108.671.246	97,87
II.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.030.800	108.671.246	97,87
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	134.236.865	126.838.987	94,49
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	134.236.865	126.838.987	94,49
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	80.991.720	77.439.287	95,61
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	44.176.225	40.842.700	92,45
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.068.920	8.557.000	94,36
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	592.378.777	469.809.440	79,31
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	592.378.777	469.809.440	79,31
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	174.998.207	129.579.500	74,05

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pelaksanaan Penanaman Modal			
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	273.306.970	228.789.640	83,71
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	144.073.600	111.440.300	77,35
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	56.732.000	52.951.072	93,34
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.732.000	52.951.072	93,34
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	56.732.000	52.951.072	93,34
	URUSAN KETENAGAKERJAAN	1.116.975.168	1.065.810.680	95,42
I.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.952.404.937	1.818.151.688	93,12
I.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.149.240.857	1.032.317.646	99,30
I.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.149.240.857	1.032.317.646	99,30
I.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	800.284.080	782.954.042	96,22
I.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	800.284.080	782.954.042	96,22
I.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.880.000	2.880.000	96,22
I.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2.880.000	2.880.000	96,22
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	29.998.700	26.701.375	90,47
II.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	29.998.700	26.701.375	90,44
II.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	29.998.700	26.701.375	96,33
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	292.282.400	291.158.400	96,41
III.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	4.100.000	4.100.000	99,48

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
III.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	4.100.000	4.100.000	99,48
III.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	288.182.400	287.058.400	95,72
III.2.1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000	4.800.000	90,56
III.2.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	283.382.400	282.258.400	100
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.261.400	0	0
IV.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.261.400	0	0
IV.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.261.400	0	0

Tabel 2.3
 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		PENANAMAN MODAL								
1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Org	80	80	1.149.240.857	1.032.317.646		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta	Keg	42	42	800.284.080	782.954.042		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								
				Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	perusahaan	82	82	2.880.000	2.880.000		
2				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
	1			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	orang	20	20	29.998.700	26.701.375		
3				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
	1			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	22	22	4.100.000	4.100.000		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	22	22	4.800.000	4.800.000		
		2		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org	4.724	4.724	283.382.400	282.258.400		
4				Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota								
	1			Pencanaan ,Penggangan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
		1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	3.308.800	3.276.000		
		2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	4	720.800	719.200		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD yang disusun	laporan	4	4	989.500	984.600		
	2			Administrasi Keuangan Perangkat daerah								
		1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	ASN	72	72	7.331.537.009	6.516.675.065	Gaji dan Tunjangan ASN di sediakan	
	3			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah								
		1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	98	98	44.055.900	43.456.000		
	4			Administrasi umum Perangkat daerah								
		1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	14.550.100	14.545.800		
		2		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	10.092.650	10.092.500		
		3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	20.112.900	20.048.000		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	10.838.200	10.769.000		
		5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	27.752.000	20.977.504	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target yaitu rekening belanja jasa iklan/reklame bersifat penyediaan jasa iklan	Akan dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan OPD
		6		Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	126	126	81.657.000	80.024.002		
		7		Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	1.357.350	1.354.000		
	5			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
	1	1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	39.274.619	39.108.333		
	6			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
		1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1000	3215	1.798.000	1.791.600		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	233.562.675	215.107.455	Belanja Listrik dan Telepon disedian setiap tahunnya	
		3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	17	580.792.590	580.138.728	Jumlah target sasaran tidak sesuai dengan jumlah yang ada	Target perlu penyesuaian dengan realitas kebutuhan Non PNS yang ada
		7		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
		1		Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	36	28	61.060.000	49.786.960	Pemeliharaan kendaraan sudah terpenuhi termasuk pajak kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan bersifat penyediaan	Akan dilakukan penyesuaian efisiensi kebutuhan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas tahun berikutnya
		2		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	63	59	26.180.000	25.154.255		
		3		Pemeliharaan rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	3	3	132.808.397	132.787.328		
		5		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
		1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1		Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	111.030.800	108.671.246	Kurangnya undangan pelaksanaan koordinasi luar daerah terhadap kegiatan promosi investasi	Akan dilakukan penyesuaian kebutuhan koordinasi luar daerah sesuai hasil evaluasi tahun sebelumnya
7				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
	1			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
		1		Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku usaha	6173	14211	80.991.720	77.439.287	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target yaitu rekening belanja jasa iklan/reklame bersifat penyediaan jasa iklan	Akan dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan OPD
		2		Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	24	24	44.176.225	40.842.700	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target yaitu rekening belanja makan dan minum rapat koordinasi perizinan yang mana bersifat penyediaan rakor permohonan perizinan dan nonperizinan	Kebutuhan akan tetap disesuaikan dengan kondisi hasil evaluasi permohonan perizinan dan nonperizinan tahun berkenaan

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3		Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non perizinan pelayanan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	11	11	9.068.920	8.557.000		
8				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
	1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	35	35	174.998.207	129.579.500	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
		2		koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	240	240	273.306.970	228.789.640	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
		3		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan	Kegiatan usaha	110	110	144.073.600	111.440.300	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sinkronisasi Pengawasan						sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	prioritas dengan kegiatan pendamping
9				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
	1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	4	4	56.732.000	52.951.072	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target yaitu rekening belanja kertas dan cover, dimana belanjanya bersifat penyediaan barang pakai habis	Akan dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan OPD
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
10				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
	1			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		1		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	2	0	2.261.400	0	Terhadap sub kegiatan tersebut pada awal tahun telah dilakukan perubahan anggaran mendahului, hampir	Untuk tahun selanjutnya akan dilakukan penyesuaian kebutuhan dan nomenklatur kegiatan sesuai

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											seluruh kode belanja dilakukan pergeseran kepada kegiatan lain sesuai PMK No. 211, sehingga tersisa belanja koordinasi luar daerah dimana untuk tahun ini belum bisa memberangkatkan transmigran sehingga berdampak pada serapan kegiatan	dengan tugas dan fungsi tanggungjawab kelembagaan

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2023 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru, dimana DPMPSTP sudah tidak bergabung lagi dengan Ketenagakerjaan dan telah berdiri sendiri. Dan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran untuk tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 6.925.783.349,00. Diharapkan pada tahun 2024 keberhasilan kinerja mencapai 92%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaa sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- f. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- g. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/pejuang investasi.
- h. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- i. Belum tersusunnya road map potensi investasi.

- j. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- k. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- l. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- m. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- n. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- o. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- p. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.

B. Urusan Ketenagakerjaan

- 1. Dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah dan terendah nomor satu se Jawa Timur sesuai rilis BPS 2023, tapi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep masih tinggi meskipun tahun 2023 mengalami tren penurunan tapi masih nomor tiga tertinggi di Jawa Timur. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan, bagaimana upaya untuk membuka lapangan pekerjaan yang cukup bagi pekerja untuk mendapatkan kesempatan kerja..
- 2. Memberikan kesempatan membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan memberikan akses ilmu pengetahuan bagi pekerja terampil.
- 3. Kualitas Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kompetensinya.

2. **Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :**

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;

- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terhadap program prioritas;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.

- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
- o. Pemantauan dan pengawasan serta identifikasi terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki izin sesuai izin usahanya.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengeanaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan kondisi terkini dan jumlah layanan.
- x. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- y. Pengeanaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dan pemberian apresiasi berupa reward bagi pelaku usaha yang rutin melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM.

B. Urusan Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan mutu tenaga kerja. dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Memperbaiki sistem pengupahan.
4. Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.
5. Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
7. Mengembangkan Sektor Informal.
8. Program Transmigrasi.

2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.
- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sumenep

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan				
				Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
2	18	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60	12	12	100,00	12	22	36,66			
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	4	4	100,00	3	7	53,33
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	4	4	100,00	4	8	53,33

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	100,00	4	12	60,00	
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	60	12,00	12,00	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	360	71	71	100,00	36	108	30	
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	25	1	1	100,00	1	2	8,00	
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	846	98	97	100,00	64	162	19,15	
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	252	50	50	97,75	50	99	39,28	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	132	6	6	100,00	26	33	25,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2023	Realisasi RKPd Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	6	6	100,00	12	18	30,00	
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	10	10	100,00	12	22	36,66	
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.789	12	12	100,00	5	17	0,101	
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.750	1	1	100,00	365	366	13,31	
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657	126	126	100,00	131	257	39,11	
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	12	12	100,00	4	16	400,00	
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	382	70	70	100,0	76	146	38,22	
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	5	5	100,00	8	13	32,50	
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	15	3	3	100,00	3	6	40,00	

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPd Tahun 2023	Realisasi RKPd Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.587	1.000	3.215	321,5	4.111	5.111	24,83	
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	185	36	28	100,00	37	73	39,46	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	322	63	59	93,65	64	127	38,25	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	2	2	100,00	2	4	40,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan				
				Target RKPd Tahun 2023	Realisasi RKPd Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11				
	URUSAN PENANAMAN MODAL													
2	18	03												
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,79	3,55	220,66	6215,99	3,67	7,22	190,50			
2	18	03	2	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	25	5	3	60,00	5	10	40,00	
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	24	1	1	100,00	5	6	25,00
2	18	04												
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,79	3,55	220,66	6215,99	3,67	7,22	190,50			
2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	32.060	6.173	14.211	230,21	6.400	12.573	39,21	
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.060	6.173	14.211	230,21	6.400	12.573	39,21
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	134	24	24	100,00	27	51	38,06

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2023	Realisasi RKPd Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	61	11	11	100,00	12	23	37,70	
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	95,00	88,00	100,00	113,63	90,00	178,00	187,36	
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	32.060	6.173	14.211	230,21	6.400	12.573	39,21	
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	47	35	35	100,00	9	46	97,87	
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.451	240	240	100,00	287	527	36,31	
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	87	101	101	100,00	17	118	135,63	
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	93	87	87	100,00	89	100	100,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	25	4	4	100,00	5	9	36,00	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan 1 (satu) Kepala Sub

Bagian, serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud adalah :
 1. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal;
 2. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 tahun 20223 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

KEPALA DINAS

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan DPMPTSP;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi pedalanan dinas;

- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan kewajiban seperti pada pasal 8 dan 9 sebagai berikut :

- (1) Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (5) Kelompok JF dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (8) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit

organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (9) Ketua Tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelompokkan substansi/kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, dalam melaksanakan tugas DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :
 1. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembangunan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 4. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
 5. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 6. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 7. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 8. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

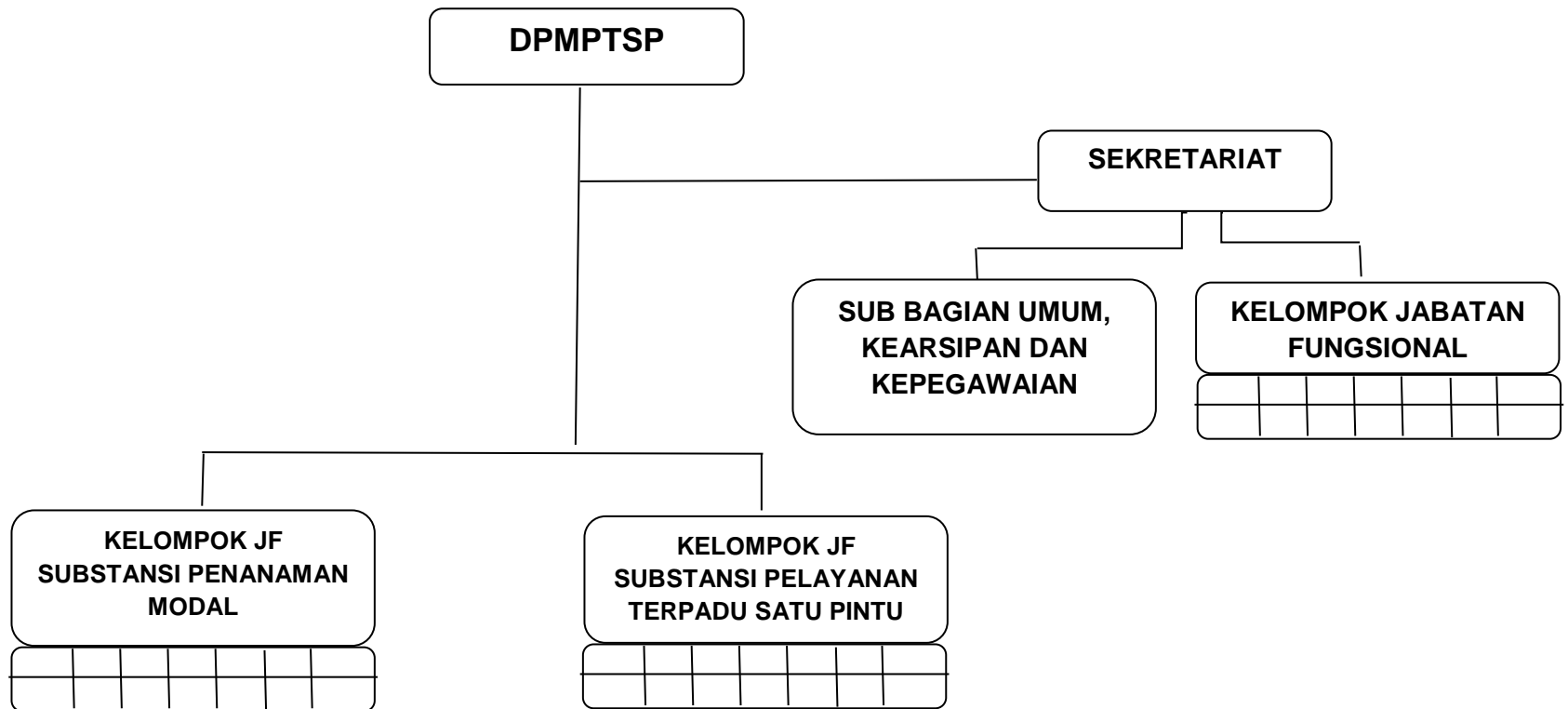
9. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 10. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
 12. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu satu Pintu, dalam melaksanakan tugas DPMPSTSP menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
 8. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,

dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengelompokan substansi/kelompok JF di lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Substansi Program dan Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Substansi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

Lampiran ; Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 69 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



_____ = Garis Komando

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 6 (enam) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon III-A
3. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian setara dengan eselon IV-A

Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maupun yang berasal dari OPD lainnya.

2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut penyajian pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah seperti pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO.	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/NILAI TARGET/STAN DART (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Sasaran											
1.	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi		3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	55,95	18,26	3,73	3,79	
2.	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat		85	86	87	87	88	86,25	88,25	87	95	
3.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan dan Non Perizinan		85	86	87	87	88	86,25	88,25	87	95	

Pencapaian Kinerja Dapat Disajikan seperti pada Tabel TC-30

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,00	20,00				20,00			
2	1801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,00	20,00				20,00			
2	1801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	12				20,00			
2	1801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	3				4			
2	1801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4	4				4			
2	1801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	4				4			
2	1801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12				20,00			
2	1801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			71	36				71			
2	1801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			0	0				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4	1				2			
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0	0				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			54	64				54			
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0	0				0			
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	0				0			
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0				0			
2	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1083	50				50			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6	26				6			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6	12				6			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10	12				10			
						jumlah paket item makan dan minum yang			3	3				3			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						disediakan											
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5	5				5			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1	365				1			
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			121	131				126			
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12	4				12			
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70	70				70			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel			0	0				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5	8				5			
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	3				3			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000	4.111				3.215			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12				12			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)						PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)		Tahun 2025 (tahun n+1)	
2 1 8 0 1 2 0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	12						12			
2 1 8 0 1 2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah							100	100					100				
2 1 8 0 1 2 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							36	35					28				
2 1 8 0 1 2 0 9 5	Pemeliharaan Mebel						Jumlah mebel yang dipelihara							0	0					0				
2 1 8 0 1 2 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara							63	33					59				
2 1 8 0 1 2 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2	2					2				
	Operasional UPTD						Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD							5	5					5				
2 1 8 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor									20,00	20,00				20,00	20,00		
							Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran									20,00	20,00				20,00	20,00		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	12			12	12	
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	3			3	3	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2	2			2	2	
2	1	0	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	12			12	12	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					36	36			36	36	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					12	12			12	12	
2	1	0	2	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4	4			4	4	
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1	1			1	1	
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0	282			64	0	
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					3	3			3	3	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7	7			0	7		
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32	32			0	32		
2	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah				52	53			50	52		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28	29			26	28		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12	12			12	12		
						jumlah paket item makan dan minum yang disediakan				3	3			3	3		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6	6			5	6		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1	1			365	1		
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136	143			131	136		
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip				4	4			4	4		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8160	Dinamis pada SKPD																
2180207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan					82	91			76	82	
21802072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan					1	1			1	1	
21802075	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1	1			1	1	
21802076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan diadakan					8	9			5	8	
2180208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah layanan jasa yang disediakan					3	3			3	3	
21802081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.402	4.722			4.111	4.402	
21802082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	12			12	12	
21802084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	12			12	12	
2180209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah jenis barang yang dipelihara					100	100			100	100	
21802092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					38	39			37	38	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
2 1 8 0 1 2 0 9 0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara					88	90			0	88	
2 1 8 0 1 2 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					66	68			64	66	
2 1 8 0 1 2 0 9 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	2			2	2	
		URUSAN PENANAMAN MODAL											
2 1 8 0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor			3,55	3,67				220,66			
2 1 8 0 3 2 0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal			5	5				3			
2 1 8 0 3 2 0 1 0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			4	4				4			
2 1 8 0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)			3,61	3,67				220,66			
2 1 8 0 4 2 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan			6.173	6.400				14.211			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
					Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												
2	1 8	0 4	2	0 1	0 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			6.173	6.400		14.211	
2	1 8	0 4	2	0 1	0 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			24	24		24	
2	1 8	0 4	2	0 1	0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			11	11		8	
2	1 8	0 5				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya			83	90		100,00	
2	1 8	0 5	2	0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berizin dan Beroperasi Sesuai Dengan Perizinan Yang Dimiliki			6.173	6.400		14.211	
2	1 8	0 5	2	0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			8	9		8	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			261	287				240			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			16	17				101			
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			87	89				90			
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	100				100			
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			5	5				5			
2	1	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					3,73	3,79	3,79		100	100	
2	1	0	2	0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					5	5	5		5	5	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)		Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)		
2	1	0	2	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																4	6		
2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																	100	100	
2	1	0	2	0	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	6.400	6.639	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	6.400	6.639	
2	1	0	2	0	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	27	29	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	12	13	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1 8 5	0					93	95	95		90	90	
2	1 8 5	0 2 0 1					6.639	6.890	6.890		6.400	6.639	
2	1 8 5	0 2 0 1 0 0 4					10	11	11		9	10	
2	1 8 5	0 2 0 1 0 0 5					316	348	348		287	316	
2	1 8 5	0 2 0 1 0 0 6					19	21	21		17	19	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2026 (tahun n+2)	Tahun 2026 (akhir renstra)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 8 0 6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					91	93	93		89	91	
2 1 8 0 6	2 0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
2 1 8 0 6	2 0 1 0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					5	5	5		5	5	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka tugas pokok DPMPTSP adalah **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP mempunyai fungsi :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..

- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya sarana promosi publikasi data profil potensi/peleluasan investasi yang seharusnya lebih masif dilakukan.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- n. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- o. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- p. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- q. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- r. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.
- s. Kurangnya daya dukung anggaran terhadap MPP dalam memenuhi kebutuhan kelangsungan pelayanan di Mall Pelayanan Perizinan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya:

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peleluasan/proyek investasi dan potensi perizinan yang clear and clean.

- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.

- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Penguasaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dan memberikan reward kepada pelaku usaha yang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 dibuat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2023 yang pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2023, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2025 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C. 31 berikut :

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.759.804.260	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.759.804.260	
	BELANJA RUTIN				5.752.678.991					5.752.678.991	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	5.752.678.991	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	5.752.678.991	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	2.536.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	2.536.000	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.614.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.614.300	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	543.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	543.200	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	378.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	378.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	4.826.733.413	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12	4.826.733.413	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.826.733.413	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.826.733.413	
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	108	151.935.440	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	108	151.935.440	
A.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.998.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.998.000	
A.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.954.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.954.400	
A.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	47.955.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	47.955.000	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	3				jumlah makan dan minum yang disediakan	3		
A.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.580.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.580.200	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12.780.000	
A.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	9.996.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	9.996.300	
A.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	56.742.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	56.742.000	
A.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	9.929.540	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	9.929.540	
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	82	4.815.014	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	82	4.815.014	
A.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	4.815.014	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	4.815.014	
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	597.638.692	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	597.638.692	
A.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4.992.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4.992.100	
A.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	233.561.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	233.561.712	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	359.084.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	359.084.880	
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah	100	169.020.432	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah	100	169.020.432	
A.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	54.895.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	54.895.000	
A.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	14.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	14.210.000	
A.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	99.915.432	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	99.915.432	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.007.125.269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.007.125.269	
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.007.125.269	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				1.007.125.269	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	210.776.740	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	210.776.740	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	210.776.740	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	210.776.740	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional /Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	210.776.740	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional /Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	210.776.740	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	293.307.325	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	293.307.325	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.639	293.307.325	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.639	293.307.325	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.639	178.335.720	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.639	178.335.720	
III.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	10	14.971.700	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	10	14.971.700	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Elektronik					Elektronik			
III.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30	99.999.905	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30	99.999.905	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya	6.639	483.041.204	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya	6.639	483.041.204	
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.639	483.041.204	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	6.639	483.041.204	
IV.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	74.150.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	74.150.000	
IV.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	315	300.850.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	315	300.850.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
IV.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19	108.041.204	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19	108.041.204	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	91,00	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	91,00	20.000.000	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	20.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	20.000.000	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	5	20.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	5	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dimanfaatkan					Dimanfaatkan			
JUMLAH PAGU INDIKATIF					6.759.804.260	JUMLAH KEBUTUHAN DANA					6.759.804.260

2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Urusan Penanaman dan pelayanan terpadu satu pintiu dalam katagori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPSTP bersifat top down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C. 32 berikut ini.

Tabel T-C. 32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BELANJA RUTIN				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	20,00	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	5	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	52	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	12	
			Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	3	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.660	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	82	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	73	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.402	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis barang yang dipelihara	4	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	88	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	10,00	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	7	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	7	
I.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	4	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,73	
II.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	5	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,73	
III.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	6.639	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.639	
III.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13	
III.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	27	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	93	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	6.639	
IV.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	
IV.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	316	
IV.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	91,00	
V.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100,00	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP Nasional pada 2025 mempunyai arah kebijakan yang diusung dengan tema adalah “ *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* “, dengan Penekanannya di dalam RKP 2025 lebih difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi, sekaligus menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, dokumen RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dan RPJPN 2025-2045, serta penjabaran awal RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai tahap awal pembangunan 5 tahunan. Dokumen RKP 2025 pun akan menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, tema RKP 2025 bakal diwujudkan melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan. *Pertama*, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. *Kedua*, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. *Ketiga*, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sementara pada RKP 2025 pertumbuhan ekonomi ditargetkan kisaran 5,3% - 5,6%, tingkat kemiskinan dipatok 7% - 8%. Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 4,5% - 5% dan proyeksi rasio gini 0,379 hingga 0,382, indeks modal manusia di kisaran 0,56%, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 38,6%.

Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKP adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya

saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada Tanggal 31 Desember 2023. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024. Selain itu RKPD tahun 2025 harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mempunyai tema adalah *“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase SKM

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	a. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	a. Meningkatnya Iklim Investasi	a. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
6.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	a. Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	a. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan

Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah, seperti pada table berikut :

Tabel 3.2.3
Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2025
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,10 %
2.	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-goverment	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-goverment	95 %

Tabel 3.2.4
 Sasaran Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2025
1.	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,79 %
2.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,05 %

Tabel 3.2.5
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2025
1.	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,79 %
2.	Meningkatnya investor	Persentase peningkatan investor	100 %
3.	Meningkatnya kualitas layanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,05 %

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan

- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up

Rencana program dan kegiatan tahun 2025 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2025.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C.33 :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sumenep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN			6.759.804.260				7.324.039.281	
	BELANJA RUTIN			5.752.678.991				6.247.860.919	
2	181 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		20,00	5.752.678.991		20,00	6.247.860.919	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00			20,00		
2	180201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		12	2.536.000		12	2.832.500	
2	1801201 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	3	1.614.000	APBD	3	1.715.000	
2	1801202 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	2	543.200	APBD	2	641.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 0 1 2 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	3	378.500	APBD		3	476.500
2 1 8 0 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		12	4.826.733.413			12	4.956.486.053
2 1 8 0 1 2 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	36	4.826.733.413	APBD		36	4.956.486.053
2 1 8 0 1 2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		108	151.935.440			108	158.039.136
2 1 8 0 1 2 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	6	4.998.000	APBD		7	5.150.453
2 1 8 0 1 2 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	6	3.954.400	APBD		7	4.185.775
2 1 8 0 1 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	7	47.955.000	APBD		8	50.402.000
		Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Sumenep	3				3	
2 1 8 0 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sumenep	2	5.580.200	APBD		3	5.750.200
2 1 8 0 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sumenep	1	12.780.000	APBD		1	12.990.000

Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumenep	4	9.996.300	APBD		4	10.890.000
2	1	0	2	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	136	56.742.000	APBD		136	58.154.208
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	12	9.929.540	APBD		12	10.516.500
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan		82	4.815.014			90	5.150.000
2	1	0	2	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sumenep	5	4.815.014	APBD		3	5.150.000
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan		3	597.638.692			3	834.893.230
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	4	4.992.100	APBD		4	5.453.100
2	1	1	2	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	233.561.712	APBD		12	423.957.553
2	1	0	2	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	359.084.880	APBD		12	405.482.577
2	1	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah		100	169.020.432			100	295.610.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 0 1 2 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sumenep	14	54.895.000	APBD		14	55.450.000
2 1 8 0 1 2 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sumenep	35	14.210.000	APBD		35	14.450.000
2 1 8 0 1 2 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sumenep	3	99.915.432	APBD		3	225.710.000
		<u>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</u>			1.007.125.269				1.076.178.362
2 1 8 0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		3,73	210.776.740			3,79	212.150.000
2 1 8 0 3 2 0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal		5	210.776.740			5	212.150.000
2 1 8 0 3 2 0 1 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	1	210.776.740	APBD		5	212.150.000
2 1 8 0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)		3,73	293.307.325			3,79	312.313.000
2 1 8 0 4 2 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan		6.639	293.307.325			6.839	312.313.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 4 2 0 1 0 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	6.639	178.335.720	APBD		6.839	187.235.000
2 1 8 4 2 0 1 0 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	10	14.971.700	APBD		11	15.788.000
2 1 8 4 2 0 1 0 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Sumenep	30	99.999.905	APBD		32	109.290.000
2 1 8 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya		93	378.524.021			95	516.376.424
2 1 8 5 2 0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan		6.639	378.524.021			6.839	516.376.424
2 1 8 5 2 0 1 0 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sumenep	10	74.150.000	DAK Non Fisik		11	81.527.237

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 5 2 0 1 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Sumenep	200	300.850.000	DAK Non Fisik		250	283.003.862
2 1 8 5 2 0 1 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Sumenep	101	108.041.204	DAK Non Fisik		100	151.845.325
2 1 8 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		91,00	20.000.000			95,00	35.338.938
2 1 8 6 2 0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		100,00	20.000.000			100,00	35.338.938
2 1 8 6 2 0 1 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Sumenep	5	20.000.000	APBD		5	35.338.938

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2025 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2025.

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2025 telah menggunakan pendekatan money follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Artinya perencanaan dan penganggaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan arah kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah telah diarahkan sedemikian rupa agar mendukung sasaran prioritas pembangunan tahun 2025. Renja DPMPTSP tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

4.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan dijabarkan dalam Sasaran Renstra OPD seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,67	18,26	497,55
2	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	86	88,25	102,61

4.2. Prioritas Pembangunan

Keterkaitan Prioritas Pembangunan sesuai dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah terhadap program/kegiatan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program/Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025

Prioritas OPD	Uraian Kegiatan	Lokus	Sub Kegiatan Prioritas	Target	Sumber Dana	Prioritas Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<u>Urusan Bidang Penanaman Modal</u>						
P1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6639 pelaku usaha	DAU APBD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis
P1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5 kegiatan Promosi	DAU APBD	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
P2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pengawasan Penanaman Modal	100 kegiatan usaha	DAK Non Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis
P3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13 orang	DAU APBD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis

4.3. Pecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada RENSTRA 2021-2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah ditentukan Sasaran dan Indikator Sasaranya, yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Iklim Investasi dengan indikator Persentase peningkatan realisasi investasi.
2. Meningkatnya Investor dengan indikator Persentase peningkatan Investor.

3. Meningkatnya kualitas layanan dengan indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Capaian Kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 4.3
Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{(RIT) - (RIT-1)}{(RIT-1)} \times 100\%$ Ket : 1. RIT = Realisasi investasi 2. RIT-1 = Realisasi investasir-1	%	3,67	18,26	Capaian Target sesuai Renstra Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Investasi terpenuhi, namun dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami penurunan pertumbuhan, akan tetapi setiap tahun realisasi investasi terus mengalami peningkatan sehingga dapat dimaknai bahwa potensi investasi/pejuang investasi/proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep masih dapat memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
2	Persentase peningkatan investor	$(RIT) - (RIT-1) / (RIT-1) \times 100\%$ Ket : 1. RIT = Realisasi investor 2. RIT-1 = Realisasi investor-1	%	100	120,67	Capaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Investor terpenuhi, dimana setiap tahunnya jumlah investor yang masuk dan menanamkan modalnya terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh UMKM
3.	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	$(\text{Total nilai persepsi per pertanyaan} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$	%	86	88,25	Capaian Target Kinerja Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat dapat terpenuhi, diukur dengan tingkat indeks kepuasan masyarakat dari target 86,25 persen Tahun 2023 terealisasi 88,25 persen.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya Iklim Investasi	<p>Program : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi- dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub kegiatan :</i> Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p>
2.	Meningkatnya Investor	<p>Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>
3.	Meningkatnya kualitas layanan	<p>Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko <p>Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</p>

		<p>Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanyab. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usahac. Pengawasan Penanaman Modal
--	--	--

Tabel 4.3.2.
Rekapitulasi Program/Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL <i>Kegiatan :</i> <i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	210.776.740,- 210.776.740,- 210.776.740,-	
6	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL <i>Kegiatan :</i> <i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	293.307.325,- 293.307.325,- 178.335.720,- 14.971.700.- 99.999.905,-	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
		<p>Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Pengendalian Pelaksanaan</i> <i>Penanaman Modal yang</i> <i>menjadi Kewenangan Daerah</i> <i>Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</p> <p>b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha</p> <p>c. Pengawasan Penanaman Modal</p>	<p>483.041.204,-</p> <p>483.041.204,-</p> <p>74.150.000,-</p> <p>300.850.000,-</p> <p>108.041.204,-</p>	

Tabel 4.3.3
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				BELANJA RUTIN		11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	114.559.96 8	126.015.96 5	138.617.56 1	152.479.31 7	167.727.24 9	184.499.97 4
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4.559.968	5.015.965	5.517.561	6.069.317	6.676.249	7.343.874
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.00 0	117.128.00 0	128.840.80 0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	9.263.115. 260	10.189.426 .786	11.208.369 .465	12.329.206. 411	13.562.127 .053	14.918.339 .758
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	9.253.115.2 60	10.178.426. 786	11.196.269. 465	12.315.896. 411	13.547.486. 053	14.902.234. 658
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	194.435.680	213.879.248	235.267.173	258.793.890	284.673.279	313.140.607
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	7.000.000	7.700.000	8.470.000	9.317.000	10.248.700	11.273.570
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	141.403.680	155.544.048	171.098.453	188.208.298	207.029.128	227.732.041
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	24.157.650
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	21.032.000	23.135.200	25.448.720	27.993.592	30.792.951	33.872.246
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	645.355.189	709.890.708	780.879.779	858.967.757	944.864.532	1.039.350.985
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	17.900.043	19.690.047	21.659.052	23.824.957	26.207.453	28.828.198
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	87.552.609	96.307.870	105.938.657	116.532.523	128.185.775	141.004.352
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	182.639.781	200.903.759	220.994.135	243.093.549	267.402.903	294.143.194
					jumlah makan dan minum yang disediakan						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang	19.196.246	21.115.871	23.227.458	25.550.203	28.105.224	30.915.746

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					disediakan						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	100.261.40 0	110.287.54 0	121.316.29 4	133.447.92 3	146.792.71 6	161.471.98 7
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	151.051.30 0	166.156.43 0	182.772.07 3	201.049.28 0	221.154.20 8	243.269.62 9
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	86.753.810	95.429.191	104.972.11 0	115.469.32 1	127.016.25 3	139.717.87 9
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang yang diadakan	475.082.23 1	522.590.45 4	547.349.50 0	574.584.45 0	604.542.89 5	637.497.18 4
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	250.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	138.076.48 8	151.884.13 7	167.072.55 0	183.779.80 6	202.157.78 6	222.373.56 5
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	87.005.743	95.706.318	105.276.94 9	115.804.64 4	127.385.10 9	140.123.61 9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan	570.448.25 4	627.493.08 0	690.242.38 8	759.266.62 7	835.193.28 9	918.712.61 8
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	3.929.485	4.322.434	4.754.677	5.230.145	5.753.159	6.328.475
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	289.568.71 3	318.525.58 5	350.378.14 3	385.415.95 8	423.957.55 3	466.353.30 9
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	276.950.05 6	304.645.06 2	335.109.56 8	368.620.52 5	405.482.57 7	446.030.83 5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	401.216.331	441.337.964	485.471.761	534.018.937	587.420.830	646.162.913
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.125.600	131.038.160	144.141.976	158.556.174	174.411.791	191.852.970
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	27.485.375	30.233.913	33.257.304	36.583.034	40.241.338	44.265.471
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32.140.400	35.354.440	38.889.884	42.778.872	47.056.760	51.762.436
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	222.464.956	244.711.452	269.182.597	296.100.856	325.710.942	358.282.036
				URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU		1.436.742.027	1.908.163.667	2.098.980.034	2.308.878.037	2.539.765.841	2.793.742.425
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	Meningkatnya iklim Investaasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	259.571.286	285.528.415	314.081.256	345.489.382	380.038.320	418.042.152
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha	159.571.286	175.528.415	193.081.256	212.389.382	233.628.320	256.991.152
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	109.571.286	120.528.415	132.581.256	145.839.382	160.423.320	176.465.652
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	180.678.300	198.746.130	218.620.743	240.482.817	264.531.099	290.984.209
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	124.994.100	137.493.510	151.242.861	166.367.147	183.003.862	201.304.248
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	687.964.771	1.084.508.685	1.192.959.554	1.312.255.509	1.443.481.060	1.587.829.166

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	687.964.77 1	1.084.508. 685	1.192.959. 554	1.312.255.5 09	1.443.481. 060	1.587.829. 166
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	611.138.69 3	1.000.000.0 00	1.100.000.0 00	1.210.000.0 00	1.331.000.0 00	1.464.100.0 00
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	45.480.728	50.028.800	55.031.680	60.534.848	66.588.333	73.247.167
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	6.345.350	6.979.885	7.677.874	8.445.661	9.290.227	10.219.250
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	40.262.750
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	284.390.70 0	312.829.77 0	344.112.74 7	378.524.02 2	416.376.42 4	458.014.06 6
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	284.390.70 0	312.829.77 0	344.112.74 7	378.524.02 2	416.376.42 4	458.014.06 6
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	124.994.100	137.493.510	151.242.861	166.367.147	183.003.862	201.304.248
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.712.400	114.083.640	125.492.004	138.041.204	151.845.325	167.029.857
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
JUMLAH						13.217.034.751	14.866.485.663	16.325.634.230	17.930.697.653	19.696.267.418	21.638.394.160

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Agar Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat ditetapkan tepat waktu, berikut ini jadwal penyelesaian dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 :

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Rancangan Awal Renja PD	Minggu IV Desember 2023	Bappeda
2.	Verifikasi Akhir Renja PD oleh Bidang Sektoral Bappeda	Minggu I-II Juli 2024	Bappeda
3.	Reviu APIP	Minggu II-III Juli 2024	Inspektorat
4.	Penetapan Renja PD	Minggu I Agustus 2024	Bagian Hukum Setda

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Matrik rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

Sumenep, Agustus 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001